

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

*Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) merupakan organisasi lintas kawasan di Asia Tenggara yang sudah berdiri sejak 8 Agustus 1967. Pada *ASEAN Summit* tahun 2003, ASEAN memutuskan untuk membentuk *ASEAN Community* yang akan diberlakukan pada tahun 2020 yang berpusat pada tiga pilar utama, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN yang bertujuan membuat integrasi ekonomi dalam wilayah Asia Tenggara dalam hal produksi dan pasar, Masyarakat Keamanan ASEAN dan Masyarakat Sosio-kultural ASEAN yang mana berkontribusi terhadap pembangunan komunitas melalui kerja sama pada masalah politik dan keamanan regional serta masalah sosial dan budaya.<sup>1</sup> Pada tanggal 13 Januari 2007, pertemuan ASEAN dilakukan di Filipina dan memutuskan untuk memajukan pemberlakuan *ASEAN Community* menjadi tahun 2015 yang terdapat di dalam *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*.<sup>2</sup>

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu pilar utama dari *ASEAN Community* yang diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015.<sup>3</sup> MEA

---

<sup>1</sup> Haiyyu Darman Moenir, "Konektivitas ASEAN : Sebagai Sebuah Pergeseran Paradigma Dalam Proses Integrasi ASEAN", *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 1, no. 1 (2015): 75, accessed October 6, 2018, <http://ajis.fisip.unand.ac.id/index.php/ajis/article/view/7/7>.

<sup>2</sup> Association of Southeast Asian Nation, "Overview - ASEAN | One Vision One Identity One Community", ASEAN | One Vision One Identity One Community, last modified 2018, accessed March 12, 2018, <http://asean.org/asean/about-asean/overview/>.

<sup>3</sup> Association of Southeast Asian Nation, "ASEAN Economic Community", Asean.Org, last modified 2018, accessed March 12, 2018, <http://www.asean.org/storage/2012/05/56.-December-2015-Fact-Sheet-on-ASEAN-Economic-Community-AEC-1.pdf>.

adalah sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan untuk meningkatkan investasi asing di kawasan tersebut.

MEA dianggap sebagai batu loncatan besar dalam kerja sama ekonomi di ASEAN yang menawarkan berbagai peluang dalam bentuk pasar sebesar US\$2.6 milyar serta 622 juta masyarakat. Pada tahun 2014, MEA secara kolektif merupakan kekuatan ekonomi ketiga terbesar di Asia serta ketujuh di dunia.<sup>4</sup> Untuk mencapai target dari MEA serta memaksimalkan peluang yang ditawarkan oleh integrasi ekonomi ini, MEA memiliki empat karakteristik utama yang saling berkaitan erat dan saling menguatkan satu sama lainnya.<sup>5</sup> Karakteristik tersebut yaitu: 1. Menciptakan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi; 2. Menjadikan ASEAN kawasan ekonomi yang kompetitif; 3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang setara antara negara anggota ASEAN; 4. Mengintegrasikan ASEAN ke dalam ekonomi global.<sup>6</sup>

Sebelum dapat menjadi kawasan yang menawarkan peluang besar, semua karakteristik tersebut harus diterapkan di ASEAN. Hal ini menjadi tantangan bagi berbagai pihak untuk dapat menjamin tercapainya target dari MEA, termasuk pemerintah subnasional. Peranan pemerintah daerah dalam memajukan MEA berada pada karakteristik ketiga MEA yaitu untuk mendukung perekonomian yang setara antara setiap negara anggota ASEAN. Melalui kerangka kerja ketiga ini, pemerintah daerah dituntut untuk berperan aktif mendukung pemerintah nasionalnya dalam menjamin pembangunan ekonomi merata di setiap daerah. Di

---

<sup>4</sup> Association of Southeast Asian Nation, "ASEAN Economic Community - ASEAN | One Vision One Identity One Community", ASEAN | One Vision One Identity One Community, last modified 2018, accessed March 12, 2018, <http://asean.org/asean-economic-community/>.

<sup>5</sup> ASEAN Economic Community Blueprint 2016 – 2025

Indonesia, perekonomian daerah sangat bergantung pada UMKM yang ada di daerahnya. Di sini, peranan pemerintah daerah sangat penting untuk mendukung UMKM yang ada di daerah dan dituntut untuk mampu membuat kebijakan yang akhirnya dapat meningkatkan kapasitas dari UMKM daerah.<sup>7</sup> Sebagian besar UMKM kekurangan akses terhadap keuangan, teknologi, tenaga kerja terampil, dan ketidakmampuan untuk mematuhi standar lokal, nasional dan yang lebih penting dengan standar internasional. Sebagian besar UMKM juga memiliki keterkaitan yang lemah dengan sektor teknologi tinggi sehingga sulit menembus pasar ekspor.

Pemerintah daerah dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan UMKM di wilayah mereka dan cara untuk mendukungnya dalam memenuhi agenda bersama seperti memperbaiki pelatihan atau meminta konsultan untuk meningkatkan keterampilan. Pemerintah daerah juga dapat membantu memulai asosiasi bisnis dengan mengelompokkan agenda bersama dan membantu bekerja sama dengan mengkoordinasikan tindakan bersama.<sup>8</sup>

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat melakukan kerja sama dengan negara lain sebagai salah satu cara untuk memperluas pasar bagi UMKM di daerah, pertukaran teknologi, serta pertukaran tenaga ahli. Bentuk aktivitas kerja sama dari pemerintah daerah dengan negara lain ini diistilahkan dengan paradiplomasi. Istilah paradiplomasi sendiri pertama kali dicetuskan dalam wacana akademis oleh sarjana Basque, Panayotis Soldatos pada tahun 1980an sebagai gabungan antara kata-kata

---

<sup>7</sup> Alvin Ang, "AEC 2015 : Challenges And Opportunities For Local Governments In ASEAN", CPG Online Magazine, 2016, accessed March 13, 2018, <http://www.cpg-online.de/2016/05/01/aec-2015-challenges-and-opportunities-for-local-governments-in-asean/>.

<sup>8</sup> Ibid, Hal 35

paralel dan diplomasi. Dengan kata lain, paradiplomasi mengacu pada kebijakan luar negeri yang dilakukan antara dua pihak yang tidak setingkat.<sup>9</sup>

Pada awalnya dalam hubungan internasional, keterlibatan daerah muncul di saat mulai dipertanyakannya model *state-centric* yang menjadi dasar pandangan hubungan internasional-tradisional dikarenakan ketidakmampuan negara dalam menjalankan pemerintahannya secara terpusat yang terbukti dengan terjadinya *great depression* era Fordism. Dalam restrukturisasi ekonomi pasca-Fordism, daerah mendapatkan kapasitas pemerintahan yang lebih besar dari negara untuk memperkuat kemampuan kota dalam memperbaiki dirinya sendiri dan mencari cara untuk merangkul *investment*.<sup>10</sup> Salah satu bentuk dari cara tersebut yaitu menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain yang selanjutnya diistilahkan dengan konsep paradiplomasi.

Aturan dan praktik internasional serta tatanan politik nasional tidak bersahabat dengan pemerintah daerah dalam hal melibatkan diri ke dalam *scene* internasional. Penjelasan teoritis mengenai hal ini yaitu bahwa daerah bukanlah aktor internasional yang pada dasarnya dalam pemikiran bahwa agen mereka yang melampaui lintas batas negara tidak bisa dianggap hal penting serta keterlibatan ini harus diproblematikakan, dijelaskan, dan diteorisasikan. Namun, pada akhir abad ke-20, tatanan dunia lebih kompleks daripada era sebelumnya yang memunculkan suatu argumen dari beberapa penstudi HI bahwa dunia sedang memasuki fase baru di mana kemajuan teknologi, perkembangan komunikasi dan informasi, lebih

---

<sup>9</sup> Muhammad Yami and Arif Darmawan, "Paradiplomacy And The Future Of Cooperation Between Regions", *International Integration for Regional Public Management* (2014): Hal 308.

<sup>10</sup> Michael Mark Amen, *Cities And Global Governance* (London: Routledge, 2016), 22-28.

terintegrasi dan saling ketergantungan antar negara.<sup>11</sup> Selain itu, perkembangan terbaru pada institusi domestik di beberapa negara barat dan tren baru dalam beberapa aspek pada struktur internasional, telah mendorong dan memberikan jalan pada pemerintah daerah pada politik dunia dan negosiasi. Dengan kata lain, sebuah celah, meskipun kecil, mulai muncul dengan tujuan untuk secara efektif memunculkan aktor territorial-institusional baru selain negara untuk mendapatkan kehadiran dalam dunia internasional.

Di Indonesia sendiri, paradiplomasi sudah banyak dilakukan oleh pemerintah subnasional yang terdiri dari pemerintah provinsi ataupun kota/kabupaten. Hal ini tidak terlepas dari wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan aktivitas hubungan internasional yakni pada UU No. 37 Tahun 1999 pada pasal 1 ayat(1) yang berbunyi;

*“Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia”.*<sup>12</sup>

Peraturan ini juga membahas mengenai batasan-batasan dari penyelenggaraan hubungan internasional dari pemerintah pusat di antaranya harus sesuai dengan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.<sup>13</sup> Selanjutnya, UU No.32 Tahun 2004 menambahkan penyesuaian mengenai kewenangan dari pemerintah daerah untuk melakukan aktivitas

---

<sup>11</sup> Poppy Irawan, "Crafting The Alternative Of Finance Hegemony: Returning Gold Dinar Exchange Economy", *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 1, no. 1 (2015): 36, accessed October 7, 2018, <http://ajis.fisip.unand.ac.id/index.php/ajis/article/view/5/5>.

<sup>12</sup> UU No. 37 Tahun 1999 Pasal 1, ayat 1

<sup>13</sup> UU No. 37 Tahun 1999 Pasal 5, ayat 1

hubungan internasional di mana rencana kerja sama internasional oleh pemerintah daerah sebelumnya harus disetujui oleh DPRD.

Selanjutnya, cakupan aktivitas dari kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 yang meliputi; a. Bidang kerja sama ekonomi yang mencakup perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, kelautan, perikanan, IPTEK, pertanian, kehutanan, pertambangan, kependudukan, pariwisata, lingkungan hidup, dan perhubungan; b. Bidang kerja sama sosial budaya, yakni pendidikan, kesehatan, kepemudaan, kewanitaan, olah raga dan kesenian, serta bidang kerja sama lainnya.<sup>14</sup>

Meskipun pemerintah pusat Indonesia memberikan berbagai batasan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan hubungan internasionalnya, namun peraturan ini masih memberikan wewenang dan kebebasan yang besar kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan aktivitas hubungan internasional. Wewenang yang besar ini tidak disia-siakan oleh aktor subnasional yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Kota Bukittinggi.

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatra Barat yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil yakni 25,239 Km<sup>2</sup>. Meski demikian, Kota Bukittinggi berada pada posisi yang sangat strategis di mana kota ini terletak pada lintasan regional yang menghubungkan Kota Payakumbuh, Kota Solok, Batusangkar, Lubuk Sikaping, dan Lubuk Basung. Selain itu, Kota

---

<sup>14</sup> Takdir Ali Mukti, Paradiplomacy Kerja sama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia, The Phinisi Press Yogyakarta(2013), hal 80.

Bukittinggi juga berada di jalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Sumatera Utara, dan Provinsi Riau.<sup>15</sup>

Dalam hal potensi wilayah, Kota Bukittinggi tidak memiliki kekayaan berupa sumber daya alam seperti hutan, gas bumi, mineral, maupun perikanan laut yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber perekonomian kota. Hal yang bisa dijadikan Kota Bukittinggi sebagai sumber perekonomian yaitu sektor pariwisata dikarenakan Kota Bukittinggi memiliki alam yang indah serta posisinya yang sangat strategis. Objek wisata yang ada di Kota Bukittinggi antara lain; Jam Gadang, Istana Bung Hatta, Rumah Adat Baanjuang, Mesjid Jami', Panorama, Lobang Jepang, Benteng Ford de Kock, Kebun Binatang, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Pariwisata Kota Bukittinggi juga diakui oleh pemerintah pusat dalam Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia NOMOR KM.70/UM.001/MP/2016 Tentang Penetapan Objek Vital Nasional di Sektor Pariwisata, dua objek wisata Kota Bukittinggi termasuk ke dalam kategori objek vital yakni Benteng Ford de Kock dan Jam Gadang.<sup>17</sup>

Selain sektor pariwisata, hal yang dapat menjadi sumber perekonomian dari Kota Bukittinggi yakni sektor UMKM yang berbasis industri kerajinan seperti usaha bordir kerancang.<sup>18</sup> Meskipun demikian, sektor UMKM dari Kota Bukittinggi juga sangat bergantung pada kunjungan wisata ke daerah tersebut dikarenakan sebagian besar UMKM di Kota Bukittinggi merupakan UMKM yang

---

<sup>15</sup> RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016-2021

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Salinan Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor Km.70/Um.001/Mp/2016 Tentang Penetapan Obyek Vital Nasional di Sektor Pariwisata

<sup>18</sup> Yeniwati, "Pengembangan Umkm Sebagai Penguatan Ekonomi Kerakyatan Di Kota Bukittinggi (Studi Kasus: Industri Kerupuk Sanjai)" (2016): 2.

menjual produk berupa oleh-oleh atau cendera mata untuk wisatawan yang berkunjung ke sana. Misalnya industri bordir kerancang yang merupakan industri inti yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian Indonesia melalui KIID(Kompetensi Industri Inti Daerah). Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Bidang Dinas Perindustrian Kota Bukittinggi, Bpk. Azhari, beliau mengatakan bahwa penjualan bordir kerancang sendiri masih berupa souvenir atau cendera mata bagi wisatawan yang berkunjung.<sup>19</sup> Begitupun dengan industri kerupuk sanjai yang merupakan salah satu kuliner khas yang biasa dijadikan oleh-oleh jika berkunjung ke Kota Bukittinggi. Produktivitas dari kerupuk sanjai sangat tinggi yakni mencapai Rp. 309 juta (total omset Rp20.129.705.000 dari 65 pelaku usaha) dalam satu tahun pada tahun 2013.<sup>20</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kunjungan wisata ke Bukittinggi merupakan hal yang harus diprioritaskan oleh pemerintah Kota Bukittinggi. Pemerintah harus bisa menjamin kunjungan wisata selalu meningkat setiap tahunnya. Sejak tahun 2013, angka kunjungan wisata ke Bukittinggi selalu meningkat. Namun, pada tahun 2015, angka kunjungan wisata ini menurun drastis. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>19</sup> Azhari. Interview by Muhammad Fhadly. Tape Recording. Bukittinggi, February 22, 2017

<sup>20</sup> Yeniwati, "Pengembangan Umkm Sebagai Penguatan Ekonomi Kerakyatan Di Kota Bukittinggi (Studi Kasus: Industri Kerupuk Sanjai)" (2016): 2.



**Tabel 1.1. Rekap Kunjungan Wisata Kota Bukittinggi  
Tahun 2013 – 2015**

NO	BULAN	TAHUN								
		2013			2014			2015		
		WISMAN	WISNUS	TOTAL	WISMAN	WISNUS	TOTAL	WISMAN	WISNUS	TOTAL
1	JANUARI	343	30,131	30,474	2,711	37,859	40,570	1,989	32,730	34,719
2	FEBRUARI	1,766	23,197	24,963	2,025	29,175	31,200	2,189	27,988	30,177
3	MARET	2,255	34,349	36,604	3,009	38,621	41,630	2,386	31,708	34,094
4	APRIL	2,160	26,927	29,087	2,669	33,241	35,910	1,848	33,642	35,490
5	MEI	3,544	33,378	36,922	3,168	40,609	43,777	3,149	44,128	47,277
6	JUNI	3,383	38,676	42,059	3,017	37,469	40,486	1,712	25,298	27,010
7	JULI	1,763	21,299	23,062	1,214	24,963	26,177	1,353	40,885	42,238
8	AGUSTUS	2,090	40,664	42,754	2,052	40,032	42,084	2,405	35,729	38,134
9	SEPTEMBER	3,478	36,147	39,625	2,843	32,126	34,969	1,866	35,150	37,016
10	OKTOBER	2,778	34,255	37,033	1,998	35,024	37,022	1,589	38,207	39,796
11	NOVEMBER	4,545	36,510	41,055	3,568	34,867	38,435	1,894	35,377	37,271
12	DESEMBER	3,962	48,612	52,574	4,227	49,052	53,279	3,590	54,093	57,683
	JUMLAH	32,067	404,145	436,212	32,501	433,038	465,539	25,970	434,935	460,905

*\*Berdasarkan Laporan Data Wisatawan yang Menginap di Hotel*

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penurunan jumlah kunjungan wisata dari tahun 2014 – 2015 sangat signifikan yakni mencapai 5 ribu orang. Dan kunjungan wisatawan mancanegara menurun hingga 7 ribu orang.

Melihat hal tersebut, peneliti merasa harus ada langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kembali angka kunjungan wisata ke daerahnya khususnya wisatawan mancanegara ke daerah mengingat pemberlakuan MEA pada tahun 2015 memberikan tantangan pada aktor subnasional untuk dapat bersaing dalam ranah global. Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh Kota Bukittinggi yaitu dengan menjalin kerja sama dengan negara tetangga yaitu Malaysia.

Malaysia merupakan negara dengan luas wilayah seluas 329.749km persegi dengan penduduk sebanyak 28,3 juta jiwa. Penduduk dari negara Malaysia terdiri dari 50% Melayu, 37% Cina, 11% India, serta sisanya adalah orang-orang Eropa, Erasia, dan penduduk asli termasuk Minangkabau. Malaysia juga memiliki

hubungan diplomatis yang dekat dengan Indonesia dan telah menjalin kerja sama di berbagai bidang sejak masa kepemimpinan Presiden Soeharto.<sup>21</sup> Malaysia dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang makmur di ASEAN di mana negaranya menempati posisi ke-3 dalam urutan pendapatan per kapita di ASEAN.<sup>22</sup> Secara demografis, Malaysia memiliki 28,7 juta penduduk dengan 22 juta di antaranya merupakan penduduk di usia produktif. Penduduk di usia produktif tersebut merupakan target potensial untuk menjadi wisatawan ke Kota Bukittinggi. Secara nasional, Malaysia telah dijadikan sebagai salah satu negara prioritas promosi pariwisata dengan target pada tahun 2017 kunjungan wisatawan dari Malaysia ke Indonesia akan mencapai 1.772.000 wisatawan.<sup>23</sup>

Bagi Bukittinggi, Malaysia sudah menjadi mitra kerja sama sejak lama. Terbukti dengan telah dibentuknya kerja sama kota kembar antara Bukittinggi dengan Seremban, Malaysia. Kerja sama ini dibentuk pada tanggal 28 November 1986 yang didasarkan pada hubungan budaya, bahasa, dan sejarah antara kedua belah pihak. Salah satu misi dari kerja sama ini yaitu untuk meningkatkan apresiasi ataupun pertukaran kesenian dan kebudayaan serta peningkatan pariwisata. Bentuk implementasi dari kerja sama *sister city* ini yaitu promosi pariwisata serta produk kerajinan Kota Bukittinggi di Seremban begitupun sebaliknya.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Sejarah Negara Com, "Tentang Negara Malaysia", Sejarah Negara Com, last modified 2018, accessed March 12, 2018, <https://www.sejarah-negara.com/2013/06/tentang-negara-malaysia.html#>.

<sup>22</sup> Bisnis.com, "Pendapatan Per Kapita Indonesia Hanya Tempati Peringkat Kelima Di Asia Tenggara | Finansial - Bisnis.Com", Bisnis.Com, last modified 2018, accessed March 13, 2018, <http://finansial.bisnis.com/read/20180107/9/723969/pendapatan-per-kapita-indonesia-hanya-tempati-peringkat-kelima-di-asia-tenggara>.

<sup>23</sup> Tempo.co, "Kementerian Pariwisata Bidik Pasar ASEAN", Tempo.Co, last modified 2017, accessed March 13, 2018, <https://bisnis.tempo.co/read/843216/kementerian-pariwisata-bidik-pasar-asean>.

<sup>24</sup> Pemerintah Bukittinggi, "Latar Belakang", Bukittinggikota.Go.Id, last modified 2018, accessed March 2, 2018, <http://www.bukittinggikota.go.id/info/latar-belakang>.

Arti penting Negara Malaysia bagi Bukittinggi juga dibuktikan dengan angka kunjungan wisatawan asing ke Bukittinggi didominasi oleh wisatawan Malaysia setiap tahunnya, seperti pada tahun 2011, 16.326 dari 26.629 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Bukittinggi berasal dari Malaysia.<sup>25</sup> Jika dilihat dari angka kunjungan wisata ke Provinsi Sumatra Barat sendiri, wisatawan Malaysia juga sangat mendominasi di mana pada tahun 2013, dari 42.614 total kunjungan mancanegara ke Sumatra Barat, 31.057 di antaranya berasal dari Malaysia.<sup>26</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

Pemberlakuan MEA sejak akhir tahun 2015 memberikan tantangan pada semua pihak untuk dapat menjamin tercapainya setiap target yang dari MEA, termasuk pemerintah subnasional. Kunci dari peranan pemerintah subnasional di dalam MEA terdapat pada karakteristik ketiga yaitu untuk mencapai perekonomian yang setara di mana peranan pemerintah subnasional di sini yaitu sebagai pihak yang membantu dalam mencapai kepentingan nasional. Salah satu bentuk dari keterlibatan pemerintah subnasional yaitu memastikan pengembangan UMKM di daerah agar dapat bersaing di dalam kawasan dan dapat mendukung perekonomian di daerah. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah subnasional yaitu dengan melakukan aktivitas paradiplomasi. Indonesia telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan hubungan internasional melalui UU

---

<sup>25</sup> Kompas Media, "Bukittinggi Diramaikan Wisatawan Malaysia - Kompas.Com", Kompas.Com, last modified 2012, accessed March 3, 2018, <http://nasional.kompas.com/read/2012/05/23/16000868/bukittinggi.diramaikan.wisatawan.malaysia>.

<sup>26</sup> Kompas Media, "Malaysia Dominasi Kunjungan Wisman Ke Sumbar - Kompas.Com", KOMPAS.Com, last modified 2014, accessed March 14, 2018, <https://travel.kompas.com/read/2014/01/10/1806005/Malaysia.Dominasi.Kunjungan.Wisman.ke.Sumbar>.

No. 37 Tahun 1999. Namun, masih terbatas pada kerja sama sektor tertentu saja. Salah satu sektor yang menjadi prioritas dalam melakukan aktivitas paradiplomasi yaitu pariwisata. Hal ini dimanfaatkan oleh Kota Bukittinggi yang merupakan salah satu kota wisata yang ada di Indonesia. Kota Bukittinggi merupakan kota dengan luas wilayah yang sangat kecil dan minim sumber daya alam. Dalam hal perekonomian, Bukittinggi bergantung pada sektor UMKM dan pariwisata. Kedua sektor inilah yang ingin dikejar oleh Bukittinggi dalam melakukan aktivitas paradiplomasi. Pada tahun 2015, angka kunjungan wisatawan asing ke Bukittinggi menurun drastis dan hal ini berbanding lurus dengan penurunan angka kunjungan wisatawan dari Malaysia. Tuntutan MEA membuat Bukittinggi harus dapat mencari solusi terhadap penurunan angka kunjungan wisatawan mancanegara ini dan meningkatkan hubungan paradiplomasi dengan Malaysia merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh Kota Bukittinggi.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan yang telah dipaparkan pada rumusan masalah di atas, pertanyaan yang muncul oleh peneliti yaitu:

**“Bagaimana Upaya Paradiplomasi Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Malaysia untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata Mancanegara Pasca Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN?”**

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana aktivitas paradiplomasi yang dilakukan oleh Kota Bukittinggi dan Malaysia dalam upaya meningkatkan angka kunjungan wisata mancanegara ke Kota Bukittinggi.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat pada berbagai pihak di antaranya:

1. Pembaca dapat mengetahui bagaimana aktivitas paradiplomasi Kota Bukittinggi dengan Malaysia sebagai upaya untuk meningkatkan angka kunjungan wisata mancanegara Kota Bukittinggi;

2. Menambah referensi dari kepustakaan Hubungan Internasional mengenai aktivitas hubungan internasional oleh aktor subnasional karena paradiplomasi tergolong fenomena yang masih baru di dalam hubungan internasional;

3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan acuan kepada pemerintah daerah khususnya Kota Bukittinggi menjalankan aktivitas paradiplomasinya.

### 1.6. Studi Pustaka

Dalam melakukan analisis terhadap judul tulisan ini, peneliti bersandar pada beberapa literatur yang dianggap berhubungan dengan penelitian. Salah satu dari literatur tersebut antara lain jurnal yang ditulis oleh Andre Lecour yang berjudul “*Paradiplomacy: Reflections on the Foreign Policy and International Relations of Regions*” yang merupakan artikel di dalam jurnal “*International Negotiation Vol. 7*”. Literatur ini menjelaskan tentang bagaimana keterlibatan aktor subnasional dalam hubungan internasional dilihat sebagai suatu fenomena yang baru dan dapat terjadi dikarenakan suatu konsep yang dinamakan *opportunity structure*. Konsep ini menjelaskan adanya hubungan antara agen dan struktur di mana aktor subnasional dilihat sebagai agen dan kerangka kerja sama regional dilihat sebagai struktur. Lecour menjelaskan bahwa kegiatan dari agen dalam hubungan

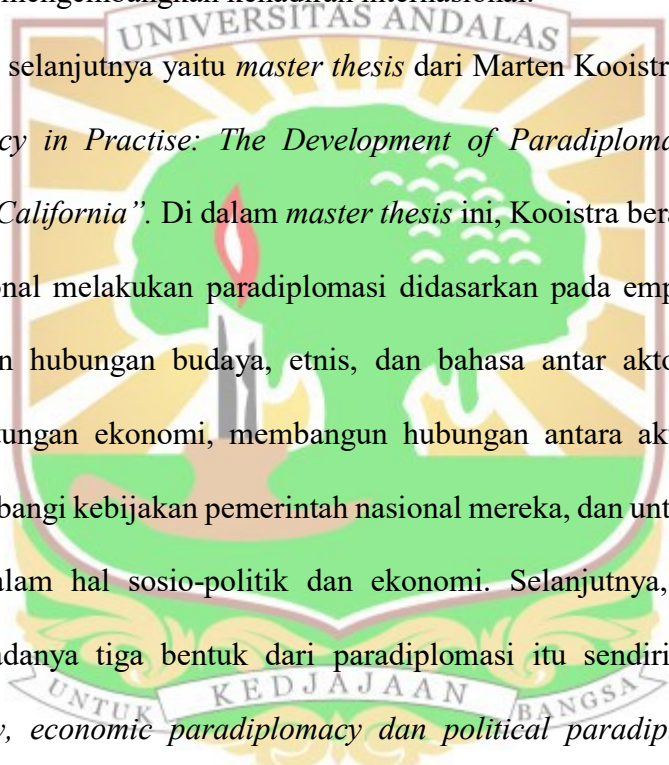
internasional disebabkan karena adanya *opportunity* yang diberikan oleh struktur. Metode yang digunakan oleh Lecour dalam menulis literatur ini yaitu menjelaskan paradiplomasi dengan berdasarkan konsep besar dalam hubungan internasional yaitu *historical institutionalisme* serta mencoba menjelaskan berdasarkan studi kasus pada berbagai aktor subnasional di Eropa yang memiliki pengaruh dalam Uni Eropa yaitu Flanders dan Waloonia.<sup>27</sup>

Literatur lainnya yaitu jurnal yang ditulis oleh Fritz Nganje yang berjudul “*The Developmental Paradiplomacy of South African Provinces: Context, Scope and the Challenge of Coordination*”. Jurnal ini menjelaskan mengenai perkembangan paradiplomasi yang dilakukan oleh aktor subnasional di Afrika Selatan dan menjelaskan mengapa usaha di tingkat nasional dan provinsi untuk mengkoordinasikan dan merasionalisasi paradiplomasi tidak sukses. Nganje berpendapat bahwa walaupun secara umum mengakui potensi manfaat dari paradiplomasi, pejabat nasional terus memiliki sikap ambivalensi terhadap badan internasional pemerintah provinsi dan daerah yang menjelaskan sifat setengah hati pada sebagian besar upaya yang gagal untuk menyelaraskan paradiplomasi dengan kebijakan luar negeri dan prioritas nasional. Di tingkat provinsi, upaya untuk mengelola paradiplomasi telah terhalang oleh hambatan struktural yang tertanam dalam kerangka konstitusional Afrika Selatan serta budaya politik yang merugikan di berbagai provinsi. Jurnal ini diawali dengan memperkenalkan gagasan tentang paradiplomasi pembangunan menuju wacana perdebatan hubungan internasional antara pemerintah daerah. Selanjutnya, Nganje memaparkan gambaran umum

---

<sup>27</sup> Andre Lecours, "Paradiplomacy: Reflections On The Foreign Policy And International Relations Of Regions", *International Negotiation* 7, no. 1 (2002): 91-114.

tentang sifat dan ruang lingkup paradiplomasi di Afrika Selatan serta memeriksa tantangan yang ada dalam pelaksanaan paradiplomasi pemerintah daerah di Afrika Selatan. Temuan dari penelitian ini yaitu ketidaksuksesan paradiplomasi di Afrika Selatan dikarenakan masih sangat terpusatnya pemerintahan di negara tersebut, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang lemah serta tantangan sosio-ekonomi di berbagai daerah yang menyebabkan pemerintah daerah tidak mampu dan tidak mau mengembangkan kehadiran internasional.<sup>28</sup>



Literatur selanjutnya yaitu *master thesis* dari Marten Kooistra yang berjudul “*Paradiplomacy in Practise: The Development of Paradiplomacy in Quebec, Scotland, and California*”. Di dalam *master thesis* ini, Kooistra berargumen bahwa aktor subnasional melakukan paradiplomasi didasarkan pada empat alasan yaitu untuk menjalin hubungan budaya, etnis, dan bahasa antar aktor asing, untuk mencari keuntungan ekonomi, membangun hubungan antara aktor subnasional untuk mengimbangi kebijakan pemerintah nasional mereka, dan untuk memperkuat *soft power* dalam hal sosio-politik dan ekonomi. Selanjutnya, Kooistra juga menjelaskan adanya tiga bentuk dari paradiplomasi itu sendiri yaitu *cultural paradiplomacy*, *economic paradiplomacy* dan *political paradiplomacy*. Dalam meneliti *master thesis* ini, Kooistra mencoba untuk menelaah tiga studi kasus yaitu Quebec, Scotland, dan California dengan cara melihat bagaimana ketiga aktor subnasional ini melakukan aktivitas *paradiplomacy*-nya dengan cara mengidentifikasi topik paradiplomasi mana yang mereka lakukan, bagaimana metodenya, serta apa pencapaian yang mereka coba untuk capai. Hasilnya, ketiga daerah tersebut menunjukkan bentuk aktivitas yang jauh berbeda di mana Quebec

---

<sup>28</sup> Fritz Nganje. "The Developmental Paradiplomacy of South African Provinces: Context, Scope and the Challenge of Coordination." *The Hague Journal of Diplomacy* 9, no. 2 (2014): 119-49.

sangat sukses dalam paradiplomasi, Scotland sedang berkembang, dan California tidak memiliki kemampuan nyata dalam mengembangkan paradiplomasi ekonomi dan politik. Perbedaan tersebut didasarkan pada empat faktor yaitu *distinctiveness, constitutional ability, foreign connections, and administrative set-up*.<sup>29</sup>

Literatur selanjutnya yang menjadi referensi dari peneliti dalam yaitu hasil konferensi internasional bertajuk "*Challenges for Foreign Ministries: Managing Diplomatic Networks and Optimising Value*" yang ditulis oleh Dr. David Criekemans dengan judul "*How subnational entities try to develop their own 'paradiplomacy'. The case of Flanders (1993-2005)*". Di dalam tulisan ini, Criekemans menjelaskan mengenai bagaimana proses paradiplomasi yang dilakukan Flanders dalam menentukan kebijakan luar negerinya termasuk bagaimana cara penentuan mitra kerja sama serta bentuk kerja sama yang dilakukan oleh entitas subnasional tersebut. Dalam menganalisis kebijakan luar negeri dari Flanders, Criekemans mencoba untuk memulai dari dokumen yang menjadi dasar aktivitas Flanders yaitu the Belgian Solution, lalu menginvestigasi kebijakan yang dilakukannya, menentukan instrumen apa yang digunakan untuk membuat kebijakan, melihat bagaimana kebijakan dari pemerintah pusat, mengidentifikasi tantangan utama serta menyimpulkan secara keseluruhan. Hasil penelitian dari Criekemans menunjukkan bahwa kesuksesan Flanders dalam hal paradiplomasi didasarkan pada kewenangan besar yang diberikan oleh Belgia pada entitas subnasionalnya dalam melakukan hubungan internasional. Selain itu, kesuksesan

---

<sup>29</sup> Marten Kooistra, "Paradiplomacy In Practise: The Development Of Paradiplomacy In Quebec, Scotland, And California" (Master, Leiden University, 2017).



Flanders juga didasarkan pada pemilihan mitra kerja sama dari Flanders yang dipilih berdasarkan urutan skala prioritas.<sup>30</sup>

Literatur terakhir yang peneliti gunakan sebagai referensi yaitu artikel di dalam jurnal *Brazilian Administration Review Vol. 8*, yang ditulis oleh Carlos R. S. Milani dan Maria Clotilde Meirelles Ribeiro yang berjudul “*International Relations and the Paradiplomacy of Brazilian Cities: Crafting the Concept of Local International Management*”. Di dalam jurnal ini Milani dan Ribeiro mencoba untuk mendiskusikan tentang paradiplomasi kota madya dalam tiga bagian: pertama, menyajikan latar belakang historis dan teoritis aktivitas paradiplomasi di Brasil; Kedua, melihat ke dalam realitas empiris beberapa kota madya Brazil dan tindakan internasional mereka; Ketiga, menyajikan serangkaian pertanyaan kritis untuk menganalisis kota-kota dan jaringan lintas batas mereka sebagai aktor politik baru di arena global. Secara empiris, makalah ini mengangkat isu-isu kunci yang berkaitan dengan berbagai cara di mana kota-kota di seluruh Brasil mengembangkan kegiatan lintas batas, sementara secara analitis artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pendekatan *soft-border* mereka, serta hubungan pragmatis mereka dan strategi inovatif *local international management*. Bukti empiris dari penelitian yang mereka lakukan mendemonstrasikan bahwa kota di Brazil, melalui aktivitas paradiplomasi mereka

---

<sup>30</sup> David Crikemans, "How Subnational Entities Try To Develop Their Own 'Paradiplomacy'. The Case Of Flanders (1993-2005).", in *Challenges For Foreign Ministries: Managing Diplomatic Networks And Optimising Value* (Geneva: University of Antwerp, 2006).

yang beragam, tidak berlawanan dengan kebijakan luar negeri serta identitas politik nasional.<sup>31</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, Dapat dilihat bahwa dari kelima literatur tersebut, hanya satu literatur yang membahas mengenai aktivitas paradiplomasi diluar Eropa dan Amerika. Itupun membahas mengenai ketidaksuksesan aktivitas paradiplomasi di daerah tersebut. Selanjutnya, dapat dilihat bahwa penelitian mengenai paradiplomasi masih berfokus pada aktor subnasional yang ada di Eropa dan Amerika. Selain itu, masih sangat sedikit literatur yang menghubungkan aktivitas paradiplomasi suatu entitas subnasional dengan suatu rezim internasional. Dalam penelitian mengenai paradiplomasi, kerangka konseptual yang jelas masih belum ada. Sebagian besar literatur menggunakan metode yang berbeda-beda dalam melakukan penelitian mengenai aktivitas paradiplomasi pemerintah daerah. Di dalam skripsi ini, peneliti akan membahas mengenai bagaimana aktivitas paradiplomasi yang dilakukan oleh Kota Bukittinggi yang merupakan salah satu kota di Indonesia untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan MEA sebagai *opportunity structure* dan negara Malaysia sebagai mitra kerja samanya.

## **1.7. Kerangka Konseptual**

### **1.7.1. Paradiplomasi**

Istilah paradiplomasi pada awalnya diperkenalkan oleh Panayotis Soldatos dan selanjutnya sering digunakan oleh Ivo Duchacek. Paradiplomasi

---

<sup>31</sup> Carlos Milani and Maria Ribeiro, "International Relations And The Paradiplomacy Of Brazilian Cities: Crafting The Concept Of Local International Management", Brazilian Administration Review 8, no. 1 (2011).

mengemukakan bahwa keterlibatan aktor subnasional secara internasional merupakan fenomena kompleks yang memiliki berbagai alasan dalam keterlibatannya dengan hubungan negara bangsa, yang mana bergantung pada isu dan situasi yang sedang dimainkan.<sup>32</sup>

Dalam kajian Hubungan Internasional, paradiplomasi merupakan kajian yang masih relative baru dan belum ada kerangka konseptual besar yang dapat digunakan untuk menganalisis aktivitas paradiplomasi.<sup>33</sup> Namun, Alex Sergunin dan Pertti Joenniemi di dalam tulisannya yang berjudul "*Paradiplomacy as a Capacity Building Strategy The Case of Russia's Northwestern Subnational Actors*" mengemukakan dua jenis metode baru dari paradiplomasi yaitu secara langsung (di mana daerah akan mengembangkan aktivitas paradiplomasinya sendiri) dan tidak langsung (di mana daerah akan mencoba untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri federal). Di dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode secara langsung yang dipaparkan oleh Alex Sergunin dan Pertti Joenniemi dalam menganalisis aktivitas paradiplomasi Kota Bukittinggi dengan Malaysia. Metode langsung dari paradiplomasi terdiri atas tujuh indikator yaitu:<sup>34</sup>

1. Membuat fondasi legal

Taktik ini sangat penting untuk aktor subnasional yang masih lemah dan membutuhkan legitimasi. Aktor subnasional cenderung akan berusaha untuk

---

<sup>32</sup> Fritz Nganje. "The Developmental Paradiplomacy of South African Provinces: Context, Scope and the Challenge of Coordination." *The Hague Journal of Diplomacy* 9, no. 2 (2014): 119-49.

<sup>33</sup> Andre Lecours, "Paradiplomacy: Reflections On The Foreign Policy And International Relations Of Regions", *International Negotiation* 7, no. 1 (2002): 91-114.

<sup>34</sup> Alexander Sergunin and Pertti Joenniemi, "Paradiplomacy As A Capacity-Building Strategy", *Problems of Post-Communism*(2018): 18-33.

membuat negara menciptakan dasar hukum yang memberikan wewenang kepada aktor subnasional untuk dapat melakukan hubungan internasional.

## 2. Menggunakan *treaty-making power*

Pada strategi ini, aktor subnasional cenderung menggunakan power yang dimilikinya untuk membuat *treaties* dengan negara lain atau aktor subnasional dari negara lain. Luas wilayah, sosioekonomi dan potensi budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensitas dari pembuatan *treaties* oleh aktor subnasional. Di Russia, strategi pembuatan *treaties* telah menjadi instrument yang efektif untuk membangun kapasitas dan menegaskan prestise domestik dan internasional.

## 3. Membentuk kantor representatif di negara asing

Untuk memfasilitasi kerja sama dengan negara asing dan meningkatkan kedekatan antara mitra kerja sama, beberapa kawasan di Russia mengatur suatu misi perdagangan dan budaya keluar negeri. Kerugian dari strategi ini yaitu akan membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakannya. Sebagian besar negara di Russia cenderung bergantung pada kedutaan federal, konsulat, dan misi perdagangan untuk mengejar kebijakan luar negeri mereka.

## 4. Menarik invesmen asing dan mempromosikan proyek bersama

Di Russia, beberapa daerah telah berhasil dalam menciptakan kondisi yang baik untuk investasi asing seperti pajak yang rendah dan pejabat lokal yang antusias. Semakin “ramah invesmen” suatu daerah, maka akan semakin mudah daerah tersebut untuk menarik investasi asing yang berdampak pada peningkatan FDI di daerah tersebut.

#### 5. Membuat citra positif keluar negeri

untuk menarik investment asing, daerah di Russia melakukan pendekatan melalui kampanye hubungan masyarakat. Contohnya mereka melakukan pameran, mengadakan “*cooperation days*” atau festival dengan kota kembar, ikut serta dalam pertemuan internasional, dan menaruh iklan pada media dari mitranya. Pemimpin daerah dan kota melakukan perjalanan keluar negeri secara regular sebagai usaha untuk hubungan masyarakat. Beberapa daerah ada yang membuat website *bilingual* yang berorientasi untuk audiens asing. Tujuan utama dari kampanye tersebut adalah untuk mempromosikan citra dari aktor daerah sebagai *platform* yang kreatif dan inovatif, bukan sebagai area yang terpencil dan tertekan.

#### 6. Bekerja sama dengan organisasi internasional

Untuk mendemonstrasikan keuntungan kompetitif dari marginalitas dan mengkonfirmasi status mereka sebagai aktor global, beberapa daerah di Russia mencoba untuk menjalin hubungan dengan organisasi internasional. Perlu diingat bahwa kerja sama dengan organisasi internasional merupakan hal penting bagi unit subnasional bukan hanya untuk mendapat dukungan lebih dari negara, namun juga untuk melibatkan diri dalam proses globalisasi dan regionalisasi.

#### 7. Meningkatkan Keterikatan

Keterikatan merupakan hal yang penting dalam menjalin hubungan internasional oleh aktor subnasional. Strategi keterikatan sangat bergantung pada persamaan sejarah. Bentuk dari persamaan sejarah ini misalnya kesamaan kebangsaan, ras, bahasa, budaya, kedekatan wilayah, sama-sama wilayah jajahan dari penjajah yang sama maupun persamaan cerita masa lalu. Kota kembar telah

menjadi bentuk dari kerja sama daerah paling sukses dan teori keterikatan terpakai pada kasus ini. Sebagai aspek dari regionalisasi, kota kembar menunjukkan bahwa batas nasional telah kehilangan kapasitasnya untuk memaksakan tatanan. Bahkan hal ini menjadikan marjinalitas yang merupakan suatu bentuk kerugian menjadi keuntungan kompetitif dan meningkatkan keterikatan. Di wilayah Eropa Utara, *twinning* menjadi satu metode yang digunakan oleh kota untuk menciptakan profil yang berbeda, terkenal, dan baik.

## **1.8. Metodologi Penelitian**

### **1.8.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Di dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode kualitatif, yakni metode untuk memahami dan mengeksplorasi makna yang dianggap oleh sekelompok orang sebagai asal dari suatu permasalahan sosial atau kemanusiaan.<sup>35</sup> Proses dari penelitian nantinya akan melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data secara spesifik, menganalisis data secara induktif, dan menafsirkan makna data yang telah didapatkan.<sup>36</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, di mana peneliti akan mencoba mendeskripsikan aktivitas paradiplomasi pemerintah daerah untuk meningkatkan salah satu sektor penting di daerah yakni bagaimana Kota Bukittinggi melakukan aktivitas paradiplomasi dengan Malaysia untuk meningkatkan angka kunjungan

---

<sup>35</sup> John W. Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches 4th Edition," (California, SAGE Publications, 2013): 4.

<sup>36</sup> *Ibid*, 4-5.

wisata mancanegara. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap dan jelas mengenai isu yang akan diteliti.

### **1.8.2. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti pada aktivitas paradiplomasi Kota Bukittinggi dengan negara Malaysia. Hal ini didasarkan pada hubungan dekat yang telah dijalin antara Bukittinggi dengan Malaysia. Aktivitas paradiplomasi Kota Bukittinggi dengan Malaysia sudah berlangsung sejak tahun 1986. Malaysia juga telah menjadi salah satu negara prioritas promosi wisata oleh Kementerian Pariwisata Indonesia. Sementara itu, penelitian ini dibatasi pada tahun 2016 hingga tahun 2018 sejalan dengan pemberlakuan dari MEA dan waktu dari penelitian ini. Peneliti memilih periode pasca pemberlakuan MEA dikarenakan hal ini memberikan peluang yang sangat besar pada pemerintahan subnasional di seluruh ASEAN untuk dapat secara langsung terjun ke dalam suatu jaringan regional dan global. Selain itu, MEA juga dapat menjadi titik awal dari pengembangan UMKM yang ada di daerah serta memberikan kesempatan bagi pemerintah subnasional untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui aktivitas paradiplomasi. Batasan-batasan tersebut digunakan peneliti untuk lebih memudahkan dalam melakukan penelitian.

### **1.8.3. Unit dan Tingkat Analisis**

Unit analisis merupakan objek yang perilakunya akan dideskripsikan, dijelaskan, dan diramalkan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, objek yang akan dijelaskan adalah Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sebagai aktor subnasional yang melakukan aktivitas paradiplomasi. Sedangkan unit eksplanasi, yaitu objek yang mempengaruhi unit analisis dalam penelitian ini adalah kunjungan

wisatawan mancanegara dari Malaysia. Joshua Goldstein menjelaskan level analisis menjadi empat bagian.<sup>37</sup> Pertama yaitu level individu, berfokus pada penelaahan sikap dan perilaku tokoh-tokoh utama pembuat keputusan. Kedua, level domestik yaitu level yang menjelaskan pengaruh sekelompok orang di dalam negara terhadap tindakan atau keputusan yang diambil oleh negara, seperti organisasi politik, kelompok kepentingan atau lembaga-lembaga negara. Ketiga level antarnegara, di mana perhatian diberikan pada pengaruh suatu negara terhadap aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Level terakhir yaitu level global, menjelaskan bagaimana pengaruh sistem internasional dalam level global. Dalam penelitian ini, level analisis yang akan digunakan yaitu level domestik, di mana penelitian akan difokuskan pada perilaku lembaga-lembaga negara, yaitu pemerintah daerah Kota Bukittinggi.

#### **1.8.4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Di dalam sebuah penelitian, data dibagi menjadi dua bagian<sup>38</sup>, yaitu:

##### **1) Data Primer dari Wawancara**

Wawancara adalah proses tanya jawab mengenai isu yang diteliti dengan pihak terkait yang bersentuhan langsung dengan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan cara semi terstruktur, yakni tidak hanya membuat konsep pertanyaan utama, adanya pertanyaan lain yang akan muncul yang berkembang dari pertanyaan utama. Wawancara adalah salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian di mana peneliti akan kehilangan informasi-informasi penting tanpa

---

<sup>37</sup> Joshua S. Goldstein, Jon C. Pevehouse, "International Relations Tenth Edition", (United States of America: Pearson Education Limited, 2014): 171 – 173

<sup>38</sup> Bagong Suyanto, "Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan", (Jakarta: Prenada Media Group, 2005): 55.



adanya wawancara, karena melalui wawancara peneliti memberikan kesempatan kepada informan untuk berbicara dan bercerita mengenai hal yang ingin peneliti cari.<sup>39</sup>

Ada beberapa tahapan dalam melakukan perencanaan wawancara<sup>40</sup>, salah satunya dengan menentukan informan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* berarti calon informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki<sup>41</sup>, yaitu orang-orang yang memiliki peran, yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai bidang yang akan diteliti. Dalam penelitian ini orang-orang yang akan diwawancara adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2. Daftar Informan**

No.	Nama Informan	Jabatan
1.	Erwin Umar	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Bukittinggi
2.	Muhammad Idris, S. Sos	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Bukittinggi
3.	Drs. Melfi, M. Si	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Bukittinggi Tahun 2014 – 2016. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bukittinggi

## 2) Data Sekunder dari teks atau arsip yang teruji keabsahannya

Data sekunder dapat lebih mudah dan cepat diperoleh karena telah tersedia, seperti di perusahaan-perusahaan, perpustakaan, organisasi perdagangan, biro pusat statistik, kantor pemerintahan hingga melalui media online. Data yang dikumpulkan berupa teks atau gambar, hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari kata

<sup>39</sup> *Ibid*, 49.

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011): 199.

<sup>41</sup> Nugraha Setiawan, "Diklat Metodologi Penelitian Sosial: Teknik Sampling", (Bogor: Departmen Pendidikan Nasional Inspektorat Jenderal, 2005): 3

untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti yang mendukung penelitian.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini, bentuk data sekunder yang akan dicari yaitu data *official* dari instansi pemerintah, dokumen perjanjian berupa MoU, surat dinas perjalanan ke luar negeri pemerintah Kota Bukittinggi, dan berita online dengan *keyword* kerja sama luar negeri Bukittinggi. Peneliti akan menganalisis data sedekat mungkin dengan bentuk rekaman dan transkripnya agar tidak mengurangi makna dan pengertian dari data tersebut hingga kemudian menjadi bentuk data primer dan sekunder.

#### 1.8.5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh, data-data tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek aspek yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan yang relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>43</sup> Menurut Miles dan Huberman,<sup>44</sup> teknik analisis data dilakukan melalui empat tahap, yang pertama yaitu pengumpulan data. Dalam penelitian, pengumpulan data terbagi menjadi data primer yang didapatkan dari proses wawancara dan data sekunder dari studi dokumen. Selanjutnya yaitu reduksi data, yang berarti memilah data yang berkaitan dengan penelitian serta merangkum dan memfokuskan data yang diperoleh. Data yang peneliti dapatkan akan dipilah sesuai kebutuhan yang merujuk pada tujuh indikator pada kerangka konseptual. Ketiga yaitu penyajian data, yakni mengolah data setengah jadi dalam bentuk tulisan dan memiliki alur tema yang jelas. Terakhir

---

<sup>42</sup> Bagong Suyanto, "Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan", (Jakarta: Prenada Media Group, 2005): 55.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008): 50.

<sup>44</sup> Emzir, "Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Rajawali Pers, 2011):129-133

yaitu kesimpulan yang merupakan tahapan akhir dan menjurus pada jawaban untuk pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya.

## **1.9. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan.**

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Signifikansi UMKM Bukittinggi untuk Mendukung MEA**

Bab ini berisi penjelasan mengenai target dan karakteristik dari MEA, keterlibatan pemerintah subnasional dalam mendukung tercapainya MEA, Peranan Pemerintah Daerah di Indonesia dalam Meningkatkan Kapasitas UMKM Daerah, dan Upaya Bukittinggi dalam Pengembangan UMKM Unggulan Daerah.

### **BAB III : Signifikansi Wisatawan Malaysia bagi Bukittinggi**

Bab ini berisi penjelasan mengenai pentingnya wisatawan Malaysia bagi Bukittinggi dengan memaparkan data mengenai jumlah wisatawan Malaysia yang ada di Kota Bukittinggi dan ketertarikan wisatawan Malaysia pada produk UMKM unggulan Bukittinggi, penjelasan mengenai kedekatan hubungan Malaysia dengan Kota Bukittinggi, hubungan *sister city* antara Kota Bukittinggi dengan Seremban, serta kerja sama yang telah diinisiasi antara Bukittinggi dengan Malaysia.

**BAB IV : Analisis Upaya Paradiplomasi Kota Bukittinggi dengan Malaysia untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata Pasca Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN**

Bab ini memaparkan analisis mengenai upaya paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi dengan Malaysia Pasca MEA dengan menggunakan tujuh indikator yang telah dipaparkan pada kerangka konseptual serta hasil penelitian berupa pengaruh dari paradiplomasi yang dilakukan oleh Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dari Malaysia.

## **BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

